

The Role of Village Government in Improving Welfare in The Wairbleler Village Fisherman Community

¹Danar Aswim*, ²Oviyanti Dua Simpi
Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere
Jl. Jendral Sudirman, Waioti, Maumere Nusa Tenggara Timur
¹danaraswim@gmail.com*
²oviyantiduasimpi99@gmail.com

(Received: 22 Juli 2022 / Accepted: 9 Nov 2022/Published Online: 3 Desember 2022)

Abstract

The purpose of this study is to find out more about the role of the Village Government in improving the welfare of the fishing community and the inhibiting factors of the Village Government in improving the welfare of the fishing community in Wairbleler Village, Waigete District, Sikka Regency. This study uses a qualitative approach method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The informants involved in this research are the village government and fishing communities. Data collection techniques used include observation techniques, interviews and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing/verification. Based on the results of the research that the Wairbleler Village Government has carried out its role by providing motivation in the form of procuring FADs, providing fishing gear facilities and providing training, the Wairbleler Village Government has carried out its role well to meet all the needs and problems of the fishing community and for various inhibiting factors the welfare of the fishing community in the form of a budget, late distribution, uneven distribution of assistance. This study suggests that the Wairbleler Village Government together with the Sikka District Fisheries Service provide facilities and pay more serious attention so that there is an even distribution of assistance so that it can increase the capture power of fishery products.

Keywords: *role of village government, welfare, fishing community*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan dan faktor-faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terkait dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Wairbleler telah menjalankan perannya yaitu dengan memberikan motivasi berupa pengadaan rumpon, memberikan fasilitas alat tangkap serta memberikan pelatihan maka Pemerintah Desa Wairbleler telah menjalankan perannya dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan dan permasalahan pada komunitas nelayan dan untuk berbagai faktor-faktor penghambat kesejahteraan masyarakat nelayan berupa anggaran, penyaluran yang terlambat, belum meratanya pemberian bantuan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Desa Wairbleler bersama dinas perikanan Kabupaten Sikka memberikan fasilitas dan memberikan perhatian yang lebih serius agar terjadi pemerataan pemberian bantuan sehingga dapat meningkatkan daya tangkap hasil perikanan.

Kata kunci: *Peran Pemerintah Desa, Kesejahteraan, Komunitas Nelayan*

I. PENDAHULUAN

Setiap Pemerintahan desa mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Setiap masyarakat pasti menginginkan pekerjaan yang layak yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kedudukan yang saling berhubungan untuk memperoleh perhatian yang seimbang dan selaras terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Menurut Rudy dalam (Surasih) Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa [2]. Pemerintah desa sebagai unit utama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan tonggak strategis untuk keberhasilan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah.

Menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat [3]. Kesejahteraan lebih menekankan pada kondisi tatanan hidup dan kondisi yang menghendaki terpenuhnya kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan bagi warga negara baik individu maupun kelompok yang aman dan makmur. Penanganan kesejahteraan itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” [4]. Adapun menurut Menurut Fahrudin Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidup aman tentram, baik lahir maupun batin [5].

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan pertambak garam. “Bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan pertambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan” [6]. Komunitas nelayan merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan berdiam dipesisir pantai secara turun temurun dengan menciptakan suasana kekerabatan. Menurut Imron yang dikutip dalam Subri nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya [7].

Desa Wairbleler salah satu desa yang ada di Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari sembilan desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Waigete. Sebagian penduduk Desa Wairbleler bermata pencarian sebagai nelayan terutama bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Pemerintah Desa sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat nelayan dimana peran menurut Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan [8].

Berdasarkan observasi pra penelitian bahwa masyarakat di pesisir pantai atau komunitas nelayan yang berada di Desa Waibleler pendapatan mereka masih bersifat harian dan jumlahnya tidak bisa ditentukan, kehidupan perekonomian sebagian dari mereka belum mencapai standar apa yang diinginkan dikarenakan seluruh kebutuhan hidup tergantung dari hasil laut dan tidak ada pekerjaan tambahan selain bermata pencaharian sebagai nelayan, minimnya tingkat pendidikan mengenai cara berneleyen yang baik dikarenakan pengetahuan yang mereka miliki hanya berdasarkan pengetahuan umum yang turun temurun dari orang tua dan peralatan atau sarana yang digunakan untuk menangkap atau mengambil hasil laut seperti sampan dan perahu selain itu ada mesin sebagai peralatan untuk

mempercepat perahu dan alat tangkap ikan seperti pukat dan jaring yang tidak layak digunakan mengakibatkan rendahnya hasil pendapatan yang mereka peroleh, apalagi didukung dengan suasana atau keadaan alam yang tidak memungkinkan dapat menghambat aktivitas mereka terutama bagi yang masih menggunakan alat tangkap secara tradisional dengan penggerak dayung yang istilah lokalnya *wehe*. Maka diharapkan permasalahan ekonomi, pendidikan, alat tangkap nelayan dapat diselesaikan apabila pemerintah bersungguh-sungguh menerapkan bantuan dengan partisipasi penuh pada komunitas nelayan. Melihat permasalahan pada masyarakat nelayan, menurut Gayatri pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan potensi daerahnya sebagai:

1. Motivator

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintahan sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat usaha terus berjalan.

2. Fasilitator

Sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung berbagai program yang telah ditetapkan.

3. Dinamisator

Dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik [9]. Penelitian ini lebih fokus pada peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete. Kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai sasaran utama Pemerintah Desa dalam memberikan motivasi, memfasilitasi dan pengadahan perubahan-perubahan atau dinamisator. Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh Ongki Andika Lala, Johanis Kaawoan dan Ismail sumampow lebih berfokus pada peran Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber daya alam dibidang kelautan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Pada kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa lebih tertuju pada peran alokasi, distribusi dan stabilisasi [10].

Gambaran permasalahan yang terjadi pada komunitas masyarakat nelayan pada Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka terkhususnya di Dusun Nangahaledoi diatas membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik penumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [11]. Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti ingin memahami peristiwa yang diamati mengenai peran Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler. Sugiyono mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan [12]. Sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, informan yang terpilih dalam peneliti ialah Pemerintah Desa dan masyarakat nelayan sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi keakuratan dari penelitian ini. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Zuchri Abdussamad teknik analisis data terdiri dari data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 4 huruf f dan h bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Berbicara mengenai kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan maka peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan kesejahteraan ini. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidup aman tentram, baik lahir maupun batin [5]. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan mengurangi rasa ketakutan atau kekhawatiran mengenai hidup yang aman dan tentram baik lahir maupun batin pada masyarakat nelayan yang berada dipesisir pantai dan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat sesuai dengan Pengaturan Desa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 oleh karena itu Pemerintah Desa telah berperan dalam memotivasi, memfasilitasi dan berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan pada masyarakat nelayan.

a. Peran Pemerintah Desa sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator sebagaimana dikemukakan oleh Gayatri “dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintahan sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat usaha terus berjalan” [9]. Peran Pemerintah Desa Wairbleler sebagai motivator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ini dapat dilihat dari bagaimana memotivasi serta memberi semangat kepada masyarakat nelayan agar mendorong suatu kemajuan dan memberi motivasi demi tercapainya tujuan yang menjadi harapan dalam usaha memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik.

Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Pemerintah Desa bahwa dukungan atau motivasi yang diberikan dengan mengadakan rumpon sebagai penyemangat masyarakat nelayan untuk mendapatkan ikan dengan mengadakan rumpon dapat memberikan kepercayaan dan mendorong semangat bagi nelayan serta menggerakkan mereka agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk mengelolah rumpon dan mendapatkan ikan sehingga dapat mempercepat peningkatan pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyatakan Pemerintah Desa Wairbleler selalu memberikan motivasi berupa tindakan dalam waktu yang akan datang serta masukan-masukan dan dukungan yang baik kepada masyarakat nelayan selain dari pada itu Pemerintah Desa Wairbleler mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk dapat memberi kepuasan bagi masyarakat nelayan. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian Ongki Andika Lala, Johanis Kaawoan dan Ismail sumampow yang menyatakan peran pemerintah desa dalam kesejahteraan masyarakat lebih pada memanfaatkan sumber daya alam dibidang kelautan Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud serta masyarakat dan investor sebagai sasaran utama diberikan motivasi.

b. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator

Berdasarkan pengamatan dan hasil peneliti yang telah diteliti dari sini masih ada fasilitas alat tangkap sudah tidak layak digunakan masyarakat nelayan untuk mencari ikan. Melihat permasalahan ini maka peran pemerintah sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan dengan memberikan bantuan alat tangkap sangat bermanfaat untuk memenuhi dan meringankan beban masyarakat nelayan. Sebagaimana disampaikan oleh informan sekretaris Desa Wairbleler bahwa selama ini Pemerintah Desa telah memberikan bantuan berupa sampan, pukot, Fiber dan mesin kepada masyarakat nelayan dan Pemerintah Desa bekerjasama dengan dinas perikanan Kabupaten Sikka untuk memberikan bantuan tersebut.

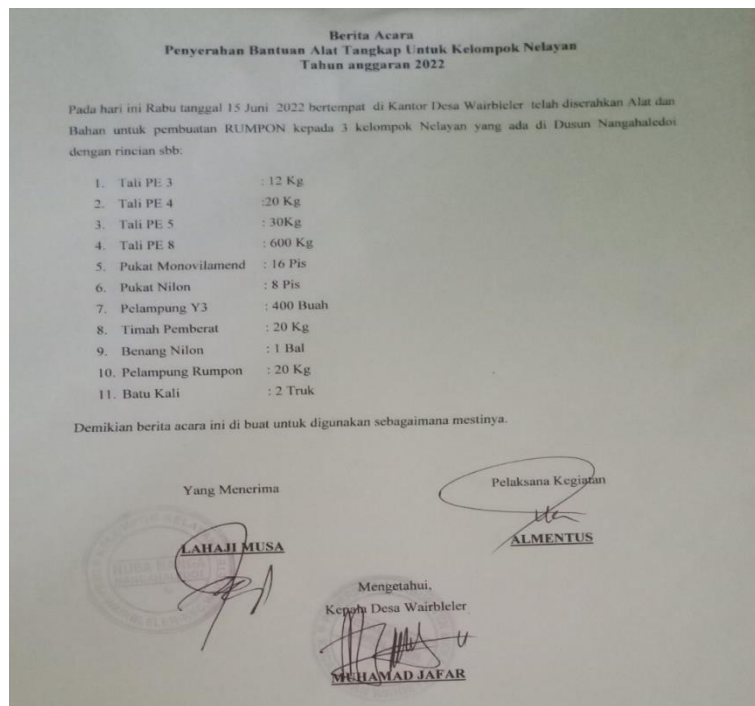
Dengan demikian hal tersebut diatas juga setara oleh beberapa nelayan yang diwawancarai peneliti pada tempat yang terpisah dan berbeda. Ketua kelompok nelayan Nubananga menyatakan Pemerintah Desa telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat nelayan berupa sampan,

pukat yang dapat kami gunakan untuk memperoleh hasil dengan cara mencari dan menangkap ikan dan ketua kelompok nelayan Bintang Laut menyatakan kami masyarakat nelayan, dan saya sendiri sangat berterimakasih dapat menerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa berupa sampam, pukat, dan mesin yang dapat membantu saya mengurangi biaya pembelian fasilitas alat tangkap yang sudah rusak dan selain itu dengan adanya fasilitas tersebut saya mencari dan menangkap ikan untuk dijual agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara peneliti dengan adanya bantuan dari Pemerintah Desa Wairbleler tersebut apabila menggunakan tolak ukur yang di kemukakan oleh Gayatri maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wairbleler telah menjalankan peran fasilitator dengan baik dan terpuji untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan. Peran pemerintah dengan memberikan bantuan tersebut telah mengadakan kerjasama dengan pihak dinas perikanan. Peran fasilitator Pemerintah Desa Wairbleler ini telah dikatakan baik karena sudah menjawab kebutuhan masyarakat nelayan seperti yang sudah dikatakan oleh para nelayan diatas.

Dalam peran fasilitator Pemerintah Desa bidang penanganan kesejahteraan ini mencakup pemberdayaan masyarakat desa untuk upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Jika dilihat hasil penelitian ini dan penelitian Ongki Andika Lala dengan kawan-kawan dikatakan sama-sama telah diberikan bantuan akan tetapi adanya perbedaan yang terdapat dalam penelitian mereka bahwa pada proses pemberian bantuan telah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta tanpa menyebutkan nama pihak tersebut.



Sumber : kamera pengambilan data 2022

Gambar. 1. (Berita Acara Penyerahan Bantuan)



Sumber : kamera pengambilan data 2022

Gambar. 2 (Pemerintah Desa Wairbleler Mengadakan Kerjasama Dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Memberikan Bantuan Perahu Fiber)

c. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator

Pemerintah Desa sebagai penggerak dalam memberikan bimbingan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Masyarakat yang maju karena partisipasi pemerintahan yang baik yang memberikan perubahan dan pengembangan masyarakatnya. Minimnya atau rendahnya pengetahuan pada masyarakat pesisir pantai atau masyarakat nelayan di Desa Wairbleler ini menjadi suatu bentuk usaha dari Pemerintah Desa dalam menyelesaikannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa bahwa untuk menjawab permasalahan dan kendala pada masyarakat nelayan tersebut maka pemerintah desa sendiri memberikan bentuk penerapan pengetahuan kepada masyarakat nelayan dengan mengadakan dan atau memberikan pelatihan agar mereka mengetahui teknik penangkapan ikan yang baik sehingga dengan begitu menumbuh rasa semangat mereka untuk memperoleh pendapat dengan hasil penangkapan ikan. Selain dari apa yang disampaikan oleh sekretaris desa, masyarakat nelayan juga memberikan suatu kesan yang baik bahwa dengan mengadakan pelatihan tersebut merupakan suatu bekal untuk mereka untuk memperoleh hasil tangkap yang lebih baik dan menambah pendapatan mereka.

Pemerintah Desa Wairbleler sebagai ujung tombak dalam kehidupan masyarakat nelayan. Yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan didesa sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [1].

Disimpulkan bahwa masyarakat yang sejahtera tentu ada penggerak dari Pemerintah Desa untuk membangun dan memajukan suatu desa. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat pada memberikan dan atau mengadakan pelatihan kepada masyarakat nelayan sebagai bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendorong dalam meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan para komunitas masyarakat nelayan.

2. Faktor-faktor penghambat Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada

komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka.

Faktor penghambat diartikan sebagai faktor yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Faktor yang menjadi penghalang atau penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas nelayan ini dapat dilihat dari anggaran, dimana anggaran dana sejauh ini untuk masyarakat nelayan masih sangat cukup sehingga belum memaksimalkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam hal anggaran atau pendanaan juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Keterlambatan penyaluran berupa peralatan tangkap kepada masyarakat nelayan yang sudah sangat membutuhkan ini menjadi hal yang perlu Pemerintah Desa atasi dengan baik, sarana prasarana dalam pengadaan bantuan yang belum memadai serta fasilitas alat tangkap nelayan yang belum memadai. Menurut Soepartono yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan [14]. Maka dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan kemajuan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan Pemerintah Desa Wairbleler harus memberikan sarana prasarana atau fasilitas terbaik sehingga ada kenyamanan bagi masyarakat nelayan, terbatasnya anggota dalam pelaksanaan pemberian bantuan, kurangnya atau belum meratanya pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan salah satu yang menjadi penghambat mengapa masyarakat nelayan belum sejahtera adalah kurangnya atau belum meratanya pemberian bantuan peralatan tangkap, dimana peralatan tangkap merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi para nelayan untuk memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian.

Sebagai penggerak dalam kegiatan masyarakat dan mengenai minimnya pengetahuan masyarakat nelayan cara bernelelan Pemerintah Desa sendiri masih belum sepenuhnya memberikan penerapan pengetahuan kepada masyarakat nelayan maka Pemerintah Desa akan lebih berusaha memberikan pengetahuan yang lebih mendalam sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat nelayan, masih banyak para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang tidak memuaskan dan sebagian dari mereka belum memiliki rumpon dari sini dengan belum mengadakan rumpon menjadi penghambat masyarakat memperoleh hasil yang lebih banyak dan kemungkinan dalam waktu yang akan datang Pemerintah Desa berusaha mengadakan atau memberikan rumpon.

Dengan demikian perlu ada langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan solusi yang baik sehingga tidak ada lagi faktor yang menghambat Pemerintah Desa Wairbleler dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan. Jika berpadu pada hasil penelitian terdahulu oleh Ongki Andika Lala, Johanis Kaawoan dan Ismail sumampow sumber daya alam dibidang kelautan yang terdapat di Desa Kuma sangat melimpah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena belum didukung oleh teknologi dan fasilitas yang memadai yang menjadi salah satu faktor penghambatnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada komunitas masyarakat nelayan di Desa Wairbleler Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka maka disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah memberikan peran yang signifikan antara lain peran Pemerintah Desa Wairbleler sebagai motivator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ini dapat dilihat dari bagaimana memotivasi serta memberi semangat kepada masyarakat nelayan agar mendorong suatu kemajuan dan memberi motivasi demi tercapainya tujuan yang menjadi harapan dalam usaha meningkatkan sumber daya ekonomi mereka. Pemerintah Desa Wairbleler telah menjalankan peran fasilitator dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan karena sudah menjawab kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat nelayan, dan Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan alat tangkap telah mengadakan kerjasama dengan pihak dinas perikanan. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat pada memberikan dan atau mengadakan pelatihan kepada masyarakat nelayan sebagai bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendorong dalam meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan para komunitas masyarakat nelayan. Faktor penghambat diartikan sebagai faktor yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal dan atau faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat gagal suatu hal. Faktor yang menjadi penghalang atau penghambat Pemerintah Desa Wairbleler dalam meningkatkan

kesejahteraan pada komunitas nelayan ini dapat dilihat dari anggaran, penyaluran yang terlambat, fasilitas yang belum memadai, belum meratanya pemberian bantuan, dan masih minimnya pemberian pengetahuan kepada masyarakat nelayan maka Pemerintah Desa Wairbleler telah berusaha sebaik mungkin sehingga tidak ada lagi faktor penghambat kesejahteraan masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan Pemerintah Desa Wairbleler bersama dinas perikanan Kabupaten Sikka memberikan fasilitas dan memberikan perhatian yang lebih serius agar terjadi pemerataan pemberian bantuan sehingga dapat meningkatkan daya tangkap hasil perikanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [2] Surasih, M. (2012). Pemerintah Desa dan Implementasinya. Jakarta : Erlangga
- [3] Rambe, Armaini. 2011. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Tesis (tidak diterbitkan). Medan : Universitas Sumatera Utara.
- [4] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [5] Fahrudin, Adi. (2012). "Pengantar Kesejahteraan Sosial". Bandung : Refika Aditama.
- [6] Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pertambak garam.
- [7] Subri, M. (2005). Ekonomi Kelautan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [8] Soekanto, S. (2009/2012). Sosiologi Keluarga. Jakarta : Rajawali Pers
- [9] Gayatri, P. (2010). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [10] Lala, Andika. Ongki, Johannis Kaawoan, Ismail Sumampow. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Bidang Perikanan Laut Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1-12.
- [11] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- [12] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (mix methods). Bandung: Alfabeta.
- [13] Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press
- [14] Soepartono, 2006. Sarana dan Prasarana. Jakarta : Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.